

HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 7, no 1, Juni 2026

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

=====

Transparansi Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Good Governance Desa Karang Sono Pasuruan

Rismatun Nikmah¹, Aminullah²

^{1,2}Universitas Yudharta Pasuruan

aminullah@yudharta.ac.id , kwarrantutur17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas transparansi data penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam perspektif *Good Governance* di Desa Karang Sono Pasuruan. Pengelolaan data penerima bantuan sosial merupakan bagian penting dalam administrasi publik karena berkaitan dengan ketepatan sasaran, keadilan pelayanan, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan perspektif administrasi publik Woodrow Wilson untuk menganalisis profesionalisme aparatur, pembagian tugas, pelaksanaan prosedur, pengelolaan dan pemutakhiran data, efektivitas, efisiensi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemikiran Wilson dipadukan dengan prinsip *Good Governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa transparansi data BPNT tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan informasi, tetapi juga oleh kualitas proses administrasi yang mendasarinya. Administrasi yang tertib, profesional, objektif, dan sesuai prosedur dapat mendukung tersedianya data penerima bantuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai mekanisme pendataan, kriteria penerima, proses pengusulan dan pemutakhiran data, serta mekanisme pengaduan. Namun, keterbukaan informasi perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi penerima bantuan. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas administrasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan *Good Governance* pada pengelolaan BPNT. Dengan demikian, pemerintah Desa Karang Sono perlu memperkuat profesionalisme aparatur, pemutakhiran data secara berkala, kejelasan pembagian tugas, komunikasi publik, dan mekanisme pengaduan agar pengelolaan bantuan lebih transparan, efektif, adil, dan akuntabel.

Kata kunci: Transparansi, Penerima Bantuan, Pangan Non Tunai, Good Governance.

Abstract

This study examines the transparency of data regarding recipients of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program from the perspective of Good Governance in Karang Sono Village, Pasuruan. The management of social assistance recipient data is a crucial aspect of public administration, as it relates to targeting accuracy, service equity, accountability, and public trust in the village government. The study employs Woodrow Wilson's public administration perspective to analyze official professionalism, the division of tasks, procedural implementation, data management and updating, effectiveness, efficiency, and information dissemination to the public. Wilson's ideas are integrated with Good Governance principles specifically transparency, accountability, participation, effectiveness, efficiency, responsiveness, and equity. The findings indicate that BPNT data transparency is determined not only by information openness but also by the quality of the underlying administrative processes. Orderly, professional, objective, and procedural administration supports the availability of more accurate and accountable recipient data. Transparency is realized through the dissemination of information regarding data collection mechanisms, eligibility criteria, nomination and data-updating processes, and complaint mechanisms. However, information disclosure must be balanced with the protection of recipients' personal data. This study underscores that the quality of public administration is a vital factor in achieving Good Governance in BPNT management. Consequently, the Karang Sono Village government needs to strengthen official professionalism, periodic data updating, the clarity of task division, public communication, and complaint mechanisms to ensure that assistance management becomes more transparent, effective, equitable, and accountable.

Keywords: Transparency, Recipient Assistance, Food Non-Cas, Good Governance.

PENDAHULUAN

Kemiskinan, kerawanan pangan, dan kelaparan masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan berbagai kemajuan dalam pembangunan nasional selama beberapa dekade terakhir, manfaat pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh akses terhadap pangan yang layak. (Asnawi, 2015)

Kerawanan pangan merupakan salah satu konsekuensi yang dapat muncul akibat kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. (Rahmatika & Dwiyantri, 2024) Kerawanan pangan menggambarkan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan, baik dari aspek jumlah, kualitas, keamanan, maupun keberlanjutan. (Rahmah et al., 2026) Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 9,78% penduduk Indonesia masih mengalami kerawanan pangan. (Tono et al., 2023) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses terhadap pangan masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut juga cenderung lebih kompleks di wilayah pedesaan, daerah terpencil, serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas ekonomi dan distribusi pangan.

Persoalan kemiskinan dan kerawanan pangan juga memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. (Rizal et al., 2025) Rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah cenderung memiliki pilihan yang lebih terbatas dalam memperoleh makanan yang bergizi dan seimbang. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah, meskipun belum tentu memiliki kualitas gizi yang memadai. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan sosial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial sebagai bentuk upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (Heryanti, 2019)

Undang-undang tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam

menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian memperkuat mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (Julianto, 2020) Kebijakan penyaluran bantuan sosial secara non tunai diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat. Perubahan mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalkan berbagai permasalahan yang dapat terjadi dalam penyaluran bantuan sosial secara tunai, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan bantuan. (Hatta, 2026)

Program bantuan langsung tunai (BLT), misalnya, memiliki sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk persoalan efektivitas penyaluran, pengawasan penggunaan dana, dan ketepatan sasaran. Yuniarti, Mulyadi, dan Sampurna menjelaskan adanya sejumlah kelemahan dalam mekanisme bantuan langsung tunai yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran dan pengawasan. Oleh sebab itu, mekanisme bantuan pangan secara non tunai dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas bantuan sekaligus memastikan bahwa bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima. Mekanisme BPNT memanfaatkan sistem elektronik dalam proses penyaluran bantuan. (Praja, 2020) Melalui mekanisme tersebut, keluarga penerima manfaat dapat memperoleh bahan pangan pada tempat atau agen yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan program. Penggunaan sistem elektronik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses distribusi bantuan. Selain itu, mekanisme tersebut juga diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Arif et al., 2026) Dengan demikian, BPNT tidak

hanya dipahami sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan karakteristik masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Tidak semua keluarga penerima manfaat memiliki tingkat literasi digital dan kemampuan yang sama dalam menggunakan sistem bantuan non tunai. Keterbatasan infrastruktur, jarak menuju agen penyalur, kondisi geografis, serta kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur program dapat menjadi hambatan dalam memperoleh manfaat BPNT secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program perlu dilihat tidak hanya dari sisi kebijakan formal, tetapi juga dari pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks tersebut, ketepatan sasaran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas BPNT. Program bantuan sosial akan sulit mencapai tujuan apabila bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kriteria penerima BPNT pada prinsipnya diarahkan kepada Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin dan tercatat dalam basis data kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelompok rentan juga menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan sosial karena memiliki risiko lebih besar mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya kriteria tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi. Di sisi lain, pelaksanaan program bantuan pangan juga perlu memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Bantuan sosial bukan hanya persoalan mengenai berapa besar bantuan yang diberikan, tetapi juga mengenai bagaimana bantuan tersebut sampai kepada masyarakat, apakah diberikan secara tepat waktu, apakah sesuai dengan kebutuhan penerima, serta apakah prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT menjadi penting untuk

mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, BPNT memiliki posisi strategis dalam kebijakan perlindungan sosial dan penanggulangan kerawanan pangan di Indonesia. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola bantuan sosial melalui mekanisme penyaluran non tunai. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh ketepatan data penerima, mekanisme penyaluran, kualitas pelayanan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) untuk memahami secara mendalam transparansi data penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, serta keterkaitannya dengan penerapan prinsip *good governance*. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian tidak berorientasi pada pengukuran angka, tetapi pada pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, tindakan, interaksi, dan kondisi sosial masyarakat. (Rasji et al., 2025) Menurut Yin, studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Desa Karangsono menjadi unit analisis dengan fokus pada mekanisme pendataan dan penetapan penerima BPNT, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi transparansi data. Prinsip *good governance* yang menjadi perhatian meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Tahapan penelitian meliputi desain studi kasus, pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi dan pelaporan hasil penelitian. (Kebijakan Sosial et al., 2023)

Fokus penelitian meliputi tiga aspek. Pertama, mekanisme pendataan dan penetapan penerima BPNT, meliputi identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan, pengumpulan dan pemutakhiran data, verifikasi, validasi, serta penetapan penerima.

Kedua, bentuk transparansi informasi data penerima BPNT kepada masyarakat, meliputi media penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, kemudahan akses, dan pemahaman masyarakat terhadap informasi bantuan. Ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan data, baik faktor internal seperti kebijakan desa, kapasitas aparatur, sumber daya, pengelolaan data, dan sistem administrasi maupun faktor eksternal seperti kondisi sosial, tekanan sosial, kepentingan politik, kondisi ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2023, Desa Karangsono terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Blusuk sebanyak 1.252 jiwa, Dusun Krajan 1.323 jiwa, Dusun Pendem 1.297 jiwa, dan Dusun Jangkang 602 jiwa, dengan jumlah keseluruhan 4.672 jiwa dan luas wilayah sekitar 420 hektare.

Data geografis dan kewilayahan mengacu pada sumber Earth dan RBI tahun 2023. Lokasi tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai transparansi data BPNT dan penerapan *good governance* pada tingkat pemerintahan desa. Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari dokumentasi, arsip, wawancara, dan observasi. Sumber data primer berasal dari kepala desa atau perangkat desa, operator desa, petugas atau pendamping BPNT, penerima BPNT, serta masyarakat yang belum menerima bantuan. Sumber sekunder berasal dari dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan, artikel ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan BPNT. Jumlah informan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian hingga informasi yang diperoleh dianggap memadai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada aparatur desa, operator, pendamping BPNT, penerima bantuan, dan masyarakat yang belum menerima bantuan. (Ulum, 2013) Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendataan, penetapan penerima, pemutakhiran data,

penyampaian informasi, kendala transparansi, serta persepsi masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah desa. Observasi dilakukan dengan mengamati proses administrasi dan pendataan, penyampaian informasi, serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data penerima BPNT, laporan kegiatan, dokumen administrasi, dan arsip terkait pelaksanaan program.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks untuk melihat pola, hubungan, persamaan, dan perbedaan informasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan berbagai temuan yang diperoleh selama penelitian. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparat desa, operator, pendamping BPNT, penerima bantuan, dan masyarakat yang belum menerima bantuan. (Faradina & Mukhlis, 2020) Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pendataan dan penetapan penerima BPNT, transparansi informasi kepada masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan data, serta keterkaitannya dengan penerapan prinsip *good governance* di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori administrasi publik Menurut Woodrow Wilson

Teori administrasi publik memiliki posisi penting dalam memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan mengelola berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu pemikiran awal yang memberikan

kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu administrasi publik dikemukakan oleh Woodrow Wilson melalui pemikirannya mengenai perlunya administrasi yang lebih sistematis, profesional, dan terpisah dari kepentingan politik. Pemikiran Wilson menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan administrasi publik modern karena menempatkan administrasi sebagai bidang yang memiliki prinsip, metode, dan kajian tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Woodrow Wilson melalui tulisannya *The Study of Administration* yang diterbitkan pada tahun 1887 menjelaskan pentingnya mempelajari administrasi secara ilmiah. Wilson melihat bahwa pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan proses politik dalam menentukan kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif oleh aparatur pemerintahan. (Anwaruddin, 2018)

Dalam pandangan tersebut, administrasi publik memiliki fungsi penting dalam menerjemahkan keputusan dan kebijakan pemerintah ke dalam tindakan nyata yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, perhatian administrasi publik tidak hanya terletak pada apa yang harus dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah melaksanakan keputusan tersebut secara efektif dan teratur. Salah satu gagasan yang sering dikaitkan dengan pemikiran Wilson adalah pemisahan antara politik dan administrasi (*politics-administration dichotomy*). Pemisahan tersebut menunjukkan bahwa proses politik memiliki fungsi dalam merumuskan kebijakan, sedangkan administrasi memiliki fungsi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Wilson berpendapat bahwa administrasi perlu dijalankan secara profesional agar proses pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis. Dalam konteks ini, aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi, bekerja berdasarkan aturan, serta menjalankan tugas secara profesional. (Pratama, 2020)

Pemikiran Wilson juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi publik tidak cukup hanya menjalankan prosedur, tetapi harus mampu menghasilkan pelayanan dan kebijakan yang memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi pemerintah perlu dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, struktur organisasi yang teratur, serta penggunaan sumber daya secara tepat. Administrasi yang baik akan membantu pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Dalam perkembangan administrasi publik, pemikiran Wilson juga dapat dikaitkan dengan pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah. Aparatur publik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi dan aturan yang berlaku. Profesionalisme diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak bergantung pada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Aparatur harus mampu menjalankan fungsi pelayanan secara objektif, konsisten, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, administrasi publik diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Pujiastuti, 2025)

Apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai transparansi data penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pemikiran Woodrow Wilson dapat digunakan untuk melihat bagaimana aparatur pemerintah desa menjalankan fungsi administratif dalam mengelola data dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses administrasi, mulai dari pendataan masyarakat, pemutakhiran informasi, penyampaian informasi kepada masyarakat, hingga pelaksanaan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bantuan sosial. Proses tersebut membutuhkan aparatur yang profesional, tertib, dan bekerja berdasarkan aturan serta kepentingan pelayanan masyarakat. Teori administrasi publik Wilson juga relevan untuk menjelaskan pentingnya pemisahan antara kepentingan administratif dan kepentingan politik dalam pengelolaan data penerima BPNT. Data penerima bantuan seharusnya ditetapkan berdasarkan kriteria dan prosedur yang telah ditentukan, bukan berdasarkan kedekatan pribadi, kepentingan politik, tekanan sosial, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Apabila proses pendataan dan penetapan penerima dipengaruhi oleh kepentingan nonadministratif, maka dapat terjadi ketidaktepatan sasaran yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program bantuan sosial.

Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep *good governance* berkembang sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan publik secara adil. Pemerintahan tidak lagi hanya dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga dituntut untuk melibatkan masyarakat serta membuka ruang pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* menempatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan, kepentingan publik, dan prinsip keadilan. (Stojanović et al., 2016)

Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, berpartisipasi, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, *good governance* menghendaki adanya hubungan yang seimbang antara kewenangan pemerintah dan hak masyarakat. Salah satu prinsip utama *good governance* adalah transparansi. Transparansi mengandung makna bahwa pemerintah harus menyediakan informasi yang relevan mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik secara terbuka serta mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, bagaimana program dilaksanakan, serta bagaimana sumber daya publik dikelola. Keterbukaan informasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, *good governance* juga menekankan prinsip responsivitas. Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, keluhan, dan permasalahan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam pelaksanaan BPNT, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan respons terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan berkaitan dengan pendataan, perubahan kondisi ekonomi, ketidaksesuaian informasi, maupun kendala dalam memperoleh bantuan. Pemerintah yang responsif tidak hanya menyediakan program, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan dan penyelesaian masalah secara layak. Prinsip efektivitas dan efisiensi juga merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan program, sedangkan efisiensi berkaitan dengan kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal. Dalam pelaksanaan BPNT, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana bantuan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sedangkan efisiensi dapat dilihat dari bagaimana proses pendataan, administrasi, dan penyaluran bantuan dilakukan dengan meminimalkan kesalahan dan pemborosan sumber daya. (A. R. Sari, 2023)

Selanjutnya, *good governance* juga berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan. Pemerintah harus memberikan pelayanan dan menjalankan kebijakan tanpa diskriminasi serta berdasarkan kriteria yang jelas. Dalam program BPNT, prinsip tersebut penting agar penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kondisi dan kriteria yang telah ditentukan, bukan berdasarkan hubungan pribadi, kedekatan sosial, maupun kepentingan tertentu. Keadilan dalam penetapan penerima bantuan dapat meningkatkan legitimasi program dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penerapan *good governance* dalam pengelolaan BPNT juga memiliki hubungan erat dengan kualitas administrasi publik. Administrasi yang tertib, profesional, dan terbuka dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, administrasi yang tidak transparan, data yang tidak diperbarui, serta lemahnya mekanisme pengawasan dapat

menimbulkan permasalahan dalam penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, prinsip *good governance* dapat digunakan untuk menilai tidak hanya hasil suatu program, tetapi juga bagaimana proses program tersebut dikelola oleh pemerintah.

Transparansi Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Good Governance Desa Karang Sono Pasuruan

Administrasi publik merupakan salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengorganisasikan sumber daya, melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan pemikiran administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Woodrow Wilson yang melalui artikelnya *The Study of Administration* pada tahun 1887 memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan administrasi publik sebagai suatu bidang kajian yang lebih sistematis. Wilson memandang bahwa administrasi perlu dipelajari secara ilmiah agar pelaksanaan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih teratur, profesional, efektif, dan efisien. Pemikiran Woodrow Wilson muncul dalam konteks kebutuhan untuk memperbaiki praktik pemerintahan yang pada masa tersebut masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Wilson memberikan perhatian terhadap bagaimana pemerintahan dapat dijalankan dengan sistem administrasi yang lebih profesional. (Salsabila et al., 2024)

Menurut pemikiran tersebut, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan demikian, administrasi publik memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara keputusan pemerintah dan pelayanan yang diterima masyarakat. Salah satu gagasan Wilson yang terkenal adalah mengenai pemisahan politik dan administrasi (*politics-administration dichotomy*). Gagasan ini menjelaskan bahwa politik memiliki hubungan dengan proses perumusan kebijakan, sedangkan administrasi lebih berorientasi pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemisahan tersebut tidak

berarti bahwa administrasi sama sekali tidak memiliki hubungan dengan politik, tetapi lebih menekankan pentingnya aparatur administrasi menjalankan tugas secara profesional dan berdasarkan aturan. Aparatur pemerintah diharapkan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. (Christanty et al., 2026)

Dalam konteks pemerintahan desa, pemikiran tersebut memiliki relevansi karena pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Aparatur desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan berbagai pelayanan publik serta program pemerintah. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah keterlibatan pemerintah desa dalam administrasi bantuan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pengelolaan BPNT membutuhkan administrasi yang tertib karena menyangkut data masyarakat, kondisi sosial ekonomi, penetapan penerima, dan proses penyampaian informasi. Teori administrasi publik Wilson dapat digunakan untuk melihat sejauh mana aparatur pemerintah Desa Karang Sono melaksanakan fungsi administrasi secara profesional dalam pengelolaan data penerima BPNT. Profesionalisme aparatur dapat dilihat dari kemampuan menjalankan tugas sesuai prosedur, mengelola data secara tertib, menjaga keakuratan informasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang atau kedekatan sosial. Dalam proses penetapan penerima bantuan, aparatur seharusnya berpedoman pada kriteria dan mekanisme yang berlaku sehingga keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan.

Pemikiran Wilson juga memberikan perhatian terhadap efisiensi administrasi. Pemerintahan perlu menggunakan sumber daya yang tersedia secara tepat agar tujuan pelayanan publik dapat dicapai dengan baik. Dalam pengelolaan BPNT, efisiensi dapat diwujudkan melalui sistem pendataan yang tertib, pembagian tugas yang jelas antara aparatur, penggunaan sistem informasi secara tepat, serta koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan sosial. Administrasi yang tidak terorganisasi dapat menyebabkan kesalahan data, keterlambatan

informasi, atau kesulitan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Selain efisiensi, efektivitas juga menjadi aspek penting dalam administrasi publik. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam program BPNT, tujuan tersebut antara lain membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, administrasi yang efektif harus mampu mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan. Data yang akurat, proses pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian dari upaya mencapai efektivitas tersebut. (Fatimah et al., 2020)

Dalam kaitannya dengan transparansi, teori Wilson dapat digunakan untuk memahami bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan proses internal pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat. Data yang dikelola pemerintah pada dasarnya menjadi dasar dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses administratif yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam pengelolaan BPNT, transparansi dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai mekanisme pendataan, kriteria penerima, proses pemutakhiran data, serta mekanisme pengaduan. Pemerintah desa tidak cukup hanya memiliki data secara administratif, tetapi juga perlu memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, transparansi menjadi bagian dari kualitas administrasi publik karena memungkinkan masyarakat mengetahui dan memahami proses pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Namun, transparansi data penerima BPNT perlu dilakukan secara proporsional. Keterbukaan informasi tidak berarti bahwa seluruh data pribadi penerima harus disebarluaskan kepada masyarakat. Pemerintah tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan batasan informasi yang dapat dipublikasikan. Informasi

yang dapat diberikan kepada masyarakat dapat berupa mekanisme pendataan, kriteria penerima, prosedur pengusulan dan pemutakhiran data, jumlah penerima secara agregat, serta mekanisme pengaduan. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan transparansi dan perlindungan terhadap informasi pribadi masyarakat. Pemikiran Wilson juga relevan dalam melihat pembagian tugas dan tanggung jawab aparatur. Administrasi yang baik membutuhkan pembagian kerja yang jelas sehingga setiap aparatur memahami tugas dan kewenangannya. Dalam pengelolaan BPNT, misalnya, terdapat aparatur yang menangani administrasi desa, operator yang mengelola data, serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan. Kejelasan pembagian tugas dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan informasi dan memperjelas pihak yang bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan dalam pengelolaan data. (Yanda & Mesran, 2022)

Dalam penelitian mengenai transparansi data penerima BPNT di Desa Karang Sono, posisi operator desa juga menjadi penting karena operator merupakan salah satu pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan informasi dan data. Apabila informasi hanya beredar pada lingkungan aparatur atau operator tanpa disertai mekanisme komunikasi kepada masyarakat, maka dapat terjadi kesenjangan informasi. Masyarakat sebagai kelompok yang berkepentingan terhadap program bantuan menjadi kurang mengetahui proses administratif yang mendasari penetapan penerima. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah desa. Teori administrasi publik Wilson juga dapat dikaitkan dengan objektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Administrasi harus dijalankan berdasarkan aturan dan kepentingan publik. Dalam konteks BPNT, penetapan penerima bantuan seharusnya didasarkan pada kondisi sosial ekonomi dan kriteria yang telah ditentukan. Aparatur tidak seharusnya menjadikan hubungan keluarga, kedekatan sosial, tekanan kelompok, maupun kepentingan tertentu sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan. Objektivitas menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria.

Selain objektivitas, administrasi publik juga membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan prosedur. Prosedur pendataan dan pemutakhiran data harus dilaksanakan secara teratur sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam data. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Masyarakat yang sebelumnya memenuhi kriteria penerima bantuan dapat mengalami peningkatan kondisi ekonomi, sementara masyarakat lain dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi dan membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, administrasi yang efektif membutuhkan pemutakhiran data secara berkala. Apabila dikaitkan dengan konsep *good governance*, teori Woodrow Wilson memberikan dasar untuk memahami dimensi internal administrasi pemerintahan, sedangkan *good governance* memperluas perhatian pada hubungan pemerintah dengan masyarakat. *Good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Sementara itu, pemikiran Wilson menekankan profesionalisme, keteraturan, efektivitas, dan efisiensi administrasi. Kedua perspektif tersebut dapat digunakan secara bersama-sama untuk menganalisis pengelolaan BPNT di Desa Karang Sono. (A. I. Sari et al., 2025)

Transparansi dalam *good governance* membutuhkan administrasi yang mampu menghasilkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas membutuhkan sistem administrasi yang memiliki pembagian tugas dan prosedur yang jelas. Partisipasi masyarakat membutuhkan adanya komunikasi dan akses informasi. Efektivitas dan efisiensi membutuhkan administrasi yang terorganisasi dan mampu menggunakan sumber daya secara tepat. Dengan demikian, kualitas administrasi publik menjadi salah satu faktor yang mendukung penerapan *good governance*. Dalam konteks penelitian ini, teori Woodrow Wilson digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Desa Karang Sono menjalankan fungsi administratif dalam pengelolaan data penerima BPNT. Analisis tersebut mencakup profesionalisme aparatur, pembagian tugas, pelaksanaan prosedur, pengelolaan dan pemutakhiran data, efektivitas administrasi, efisiensi pelayanan, serta kemampuan aparatur dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana kualitas administrasi dapat

memengaruhi transparansi data penerima bantuan. (Kadri et al., 2026)

Apabila administrasi dilaksanakan secara profesional dan terbuka, masyarakat akan lebih mudah memahami proses pelaksanaan BPNT. Sebaliknya, apabila administrasi tidak disertai komunikasi yang memadai, informasi hanya berada pada pihak tertentu, atau prosedur tidak dijelaskan kepada masyarakat, maka dapat muncul kesenjangan informasi. Kesenjangan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan penerima dan pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, teori administrasi publik Woodrow Wilson memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian Transparansi Data Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Perspektif *Good Governance* di Desa Karang Sono Pasuruan. Teori ini memberikan dasar untuk melihat bahwa transparansi data tidak hanya merupakan persoalan keterbukaan informasi, tetapi juga merupakan hasil dari proses administrasi yang profesional, efektif, efisien, objektif, dan teratur. Pemerintah desa sebagai pelaksana administrasi harus mampu mengelola data berdasarkan prosedur, menjaga keakuratan informasi, memberikan pelayanan secara adil, dan menyediakan informasi yang dapat dipahami masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Transparansi Data Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Perspektif *Good Governance* di Desa Karang Sono Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa kualitas administrasi publik memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan bantuan sosial yang transparan, efektif, efisien, objektif, dan akuntabel. Pemikiran administrasi publik Woodrow Wilson memberikan landasan bahwa administrasi pemerintahan harus dilaksanakan secara profesional, teratur, berdasarkan prosedur, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks pengelolaan BPNT, prinsip tersebut tercermin melalui pengelolaan data yang tertib, pembagian tugas yang jelas, pemutakhiran data secara berkala, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Transparansi data penerima BPNT tidak hanya berkaitan

dengan keterbukaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah desa menyediakan informasi yang jelas mengenai mekanisme pendataan, kriteria penerima, proses pengusulan dan pemutakhiran data, serta mekanisme pengaduan. Keterbukaan informasi diperlukan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun, transparansi tetap harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih diarahkan pada mekanisme dan proses administratif serta data agregat, bukan membuka seluruh informasi pribadi penerima bantuan. Dalam perspektif *good governance*, transparansi memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keadilan. Administrasi yang profesional dan terbuka dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, keterbatasan komunikasi, ketidakjelasan prosedur, dan lemahnya pemutakhiran data dapat menimbulkan kesenjangan informasi serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, penerapan pemikiran Woodrow Wilson yang dipadukan dengan prinsip *good governance* menjadi kerangka penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan data penerima BPNT di Desa Karang Sono. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa administrasi berjalan secara profesional, objektif, teratur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga data bantuan dapat dikelola secara akurat, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Anwaruddin, A. (2018). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung*, 1–16. <https://www.stialanbandung.ac.id/jia/index.php/jia/article/view/192>.
- Arif, Novianti, E., Pratama, M., & Ari Santoso, Y. (2026). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Warga Penerima Manfaat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 184–200. <https://jurnal.ar>

raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/34479.

Asnawi, R. (2015). Perubahan Iklim Dan Kedaulatan Pangan Di Indonesia. Tinjauan Produksi Dan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 1(03), 293–309.

Christanty, A. P., Guntari, R. A., Prabawati, I., & Sumarsyah, W. (2026). Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan. *Journal Social Society*, 6(3), 2481–2491. <https://pusdig.my.id/jss/article/view/1480/1239>.

Faradina, A., & Mukhlis, M. (2020). Analisis Berpikir Logis Siswa Dalam Menyelesaikan Matematika Realistik Ditinjau Dari Kecerdasan Interpersonal. *Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 2(2), 129–151. <https://doi.org/10.35316/alifmatika.2020.v2i2.129-151>.

Fatimah, M., Hasanah, B., & Sururi, A. (2020). Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat. *Jspm*, 5(045), 1–12. <https://pdfs.semanticscholar.org/4f7a/adfa84d8a5190166ec50445f9bd1d23a5613.pdf>.

Hatta, A. N. (2026). Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Meningkatkan Kondisi Ekonomi Warga Pampang Makassar. *Jurnal Ruang Sosialia*, 02(01), 153–163. <https://journal.alghani-cendekia.com/index.php/JRS/en/article/view/253/130>.

Heryanti, H. (2019). Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2), 46–72. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.501>.

Julianto, P. (2020). Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. <https://fuad.iainkerinci.ac.id/sites/fuad.iainkerinci.ac.id/files/2023>.

Kadri, M. F., Syamsuddin, D., & Larissa, D. (2026). Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jeneponto Perspektif Siyasa Syar ' iyyah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 7321–7328. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/8423>.

Kebijakan Sosial, E., Nizar Purnama, I., Hasanah, B., Sururi, A., & Serang Raya, U. (2023). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik EVALUASI KEBIJAKAN SOSIAL*

- (STUDI PADA PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA SERANG). 13(1), 41–56.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/7338/2682>.
- Praja, D. T. A. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 14(2), 49–55.
<https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.26>.
- Pratama, M. R. (2020). Trajektori Studi Administrasi Publik. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 169. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6650>.
- Pujiastuti, N. (2025). Perkembangan Pemangunan Berkelanjutan Administrasi Publik Dalam Kebijakan di Masa Depan. *Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(2), 177–186. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/9249/7492>.
- Rahmah, S., Dewi, A. K., Dermawan, D. B. P., & Vabella, D. I. (2026). Analisis Ketahanan Pangan di Kabupaten Pemalang: Kajian Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Pemanfaatan Pangan dengan Pendekatan FSVA. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 8(1), 345–363.
<http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/ecoducation/article/view/2564/2054>.
- Rahmatika, A., & Dwiyantri, N. (2024). Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 131–144.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3052>.
- Rasji, Chang, E., & Frederica, N. (2025). Keadilan Sosial Dalam Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Marginal: Studi Kasus Program BPNT Dan PKH. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 163–172.
<https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>.
- Rizal, M., Gustami, H., Saleh, M., & Rizkina, A. (2025). Program Ketahanan Pangan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Bireuen. *Indomera*, 6(12), 22–31.
<https://doi.org/10.55178/idm.v6i12.537>.
- Salsabila, A., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi Implementasi Program Bpnt Dalam Penanganan Kemiskinan Di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Katarsis (Jurnal Administrasi Publik)*, 1, 14–25.
<http://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/katarsis/article/view/280/226>.

- Sari, A. I., Jurana, Karim, F., Paranoan, S., & Ansar, M. (2025). Makna Keadilan dalam Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pangan Non Tunai. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 1215–1231. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/934>.
- Sari, A. R. (2023). The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 39–46. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>.
- Stojanović, I., Ateljević, J., & Stević, R. S. (2016). Good Governance As a Tool of Sustainable Development. *European Journal of Sustainable Development*, 5(4), 558–573. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n4p558>.
- Tono, Ariani, M., & Suryana, A. (2023). Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.1-20>.
- Ulum, R. (2013). Prospek Pemabangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas. *Analisa*, 20(01), 25–35. https://www.researchgate.net/publication/291246379_Prospek_Pembangunan_Masyarakat_Pasca_Konflik_Sambas.
- Yanda, A., & Mesran, M. (2022). Penentuan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menerapkan Metode Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA). *Bulletin of Informatics and Data Science*, 1(2), 38. <https://doi.org/10.61944/bids.v1i2.42>